

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, kita menyadari bahwa perjalanan merupakan kegiatan yang sering dilakukan untuk mencari makanan misalnya, sebagai bentuk upaya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Banyak orang melakukan perjalanan dengan tujuan untuk berdagang, migrasi, dan motivasi kesenangan. Pariwisata adalah perjalanan satu orang atau lebih yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling menuju tempat tujuan wisata baik secara terencana maupun tidak terencana yang dapat menghasilkan pengalaman bagi pelakunya. Pariwisata berasal dari dua kata “Pari” dan “Wisata”. Pari dapat diartikan sebagai banyak, berkali-kali, berputar-putar atau lengkap, sedangkan “Wisata” dapat diartikan sebagai perjalanan atau bepergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata “*Travel*” dalam Bahasa Inggris. Atas dasar itu maka kata “Pariwisata” dapat juga diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat lain yang dalam Bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “*Tour*” (Yoeti, 1991). Pariwisata termasuk sektor industri yang berpotensi untuk dikembangkan terhadap perekonomian suatu daerah., hal ini dapat membawa keuntungan bagi daerah yang memiliki aset berupa objek wisata yang diminati masyarakat. Oleh karena itu, objek wisata mendatangkan manfaat dan keuntungan bagi daerah-daerah yang menerima kedatangan wisatawan.

Dalam aspek ekonomi, pembangunan pariwisata memiliki peran penting terutama bagi masyarakat yang melakukan kegiatan bisnis disekitar objek wisata tersebut untuk bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Secara otomatis pendapatan atau kas daerah objek wisata tersebut dapat mengalami peningkatan seiring berkembangnya berbagai objek wisata dan kunjungan wisatawan di daerah tersebut, serta meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat yang berada di daerah kawasan wisata. Pariwisata mempunyai karakteristik tersendiri dalam penanganan dan pengelolaannya, sehingga tidak hanya sekedar modal kerja tetapi juga memerlukan suatu keahlian, ketekunan, dan dedikasi yang tinggi dan pandai memanfaatkan peluang yang ada dalam menjadikan pariwisata sebagai sumber pendapatan bagi negara.

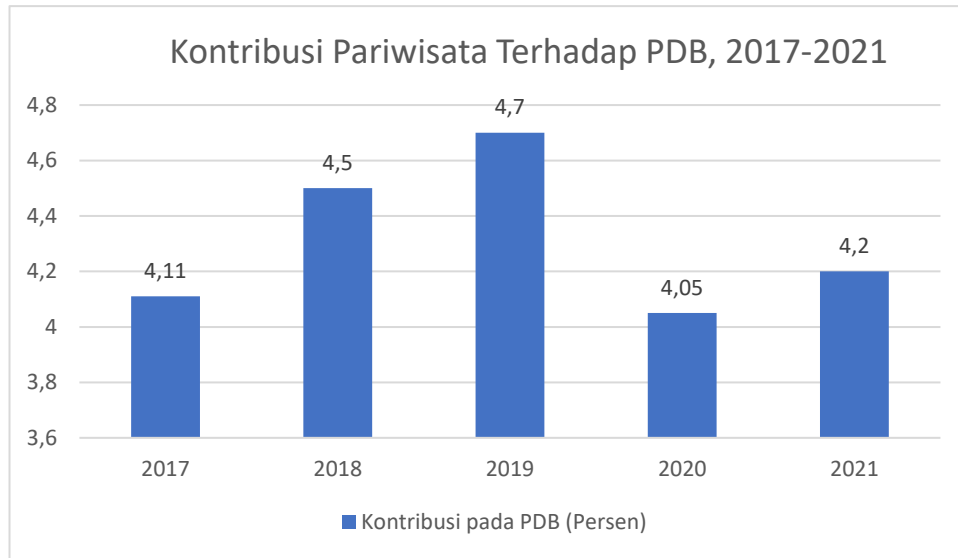
Berkembangnya pariwisata di Indonesia akan mendorong permintaan pariwisata, permintaan pariwisata adalah kesempatan wisata yang diinginkan oleh masyarakat secara umum dengan tersedianya fasilitas yang memadai dan memenuhi keinginan masyarakat (Douglass, 2011). Sebagai pengembangan sosial budaya dan mempromosikan citra bangsa di luar negeri, maka dari itu pariwisata di Indonesia merupakan sektor yang cepat berkembang dan dianggap sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling penting mendukung perekonomian sebagai sumber pendapatan bagi negara. Sektor ini yang diharapkan dapat menjadi penghasil devisa yang sangat besar di negara Indonesia.

Pada upaya pengembangan pariwisata, dalam hal ini, pemerintah menetapkan program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) merupakan salah satu program prioritas nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2009, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk mengembangkan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam suatu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Memacu pada program ini, pemerintah bertujuan meningkatkan daya saing pariwisata yang ada di Indonesia mampu bersaing di tingkat global. Untuk menetapkan pembangunan pariwisata nasional, terdapat Kawasan Strategis Pariwisata Nasional menjadi daya tarik wisatawan dan citra yang sudah dikenal luas, memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga daya dukung lingkungan hidup yang menjadi sasaran dan tujuan kunjungan wisatawan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rancangan Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025 terdapat 88 yang menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang tersebar di 50 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN). Kemudian pemerintah menetapkan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau 10 “Bali Baru” yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 adalah Tanjung Kalayang (Bangka Belitung), Candi Borobudur (Jawa Tengah), Morotai (Maluku Utara), Pulau Komodo-Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Taman Nasional Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Danau Toba (Sumatra Utara), Bromo Tengger Semeru (Jawa Timur), Mandalika Lombok (Nusa Tenggara Barat), dan Tanjung Lesung (Banten). Kawasan pariwisata tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas guna menurunkan waktu serta biaya transportasi yang berpengaruh terhadap biaya

logistik. Dengan demikian, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kepariwisataan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjunjung sektor pariwisata di Indonesia lebih unggul di kelas dunia. Beranekaragaman kekayaan budaya Indonesia menjadi potensi yang sangat tinggi untuk dilestarikan, maka dari itu banyak berbagai kegiatan pariwisata yang mendukung diseluruh wilayah untuk dikembangkan.

Sebagai sektor unggulan, banyak dampak yang ditimbulkan dari adanya Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) terutama dampak yang baik bagi perekonomian Indonesia, antara lain dampak pada kontribusi pariwisata terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). Pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB pariwisata mengalami fluktuatif di setiap tahunnya, tercatat bahwa kontribusi pariwisata terhadap PDB pada tahun 2017 kontribusi berada pada 4,11% kemudian meningkat pada tahun 2018 dengan besaran kontribusi 4,5% di ikuti pada tahun 2019 meningkat pula menjadi 4,7%, sementara pada tahun 2020 mulai mengalami penurunan kontribusi sebesar 4,05% karena adanya pandemi covid-19, sektor pariwisata mengalami penurunan. Terlihat dari pengurangan jam kerja wisata terbatas sehingga tidak ada pemasukan dari wisatawan. Akan tetapi, pada tahun 2021 kontribusi kembali mengalami sedikit peningkatan yaitu berada pada besaran 4,2% di dorong oleh pemulihan ekonomi yang mengakibatkan meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara, dan wisatawan nusantara wisatawan.

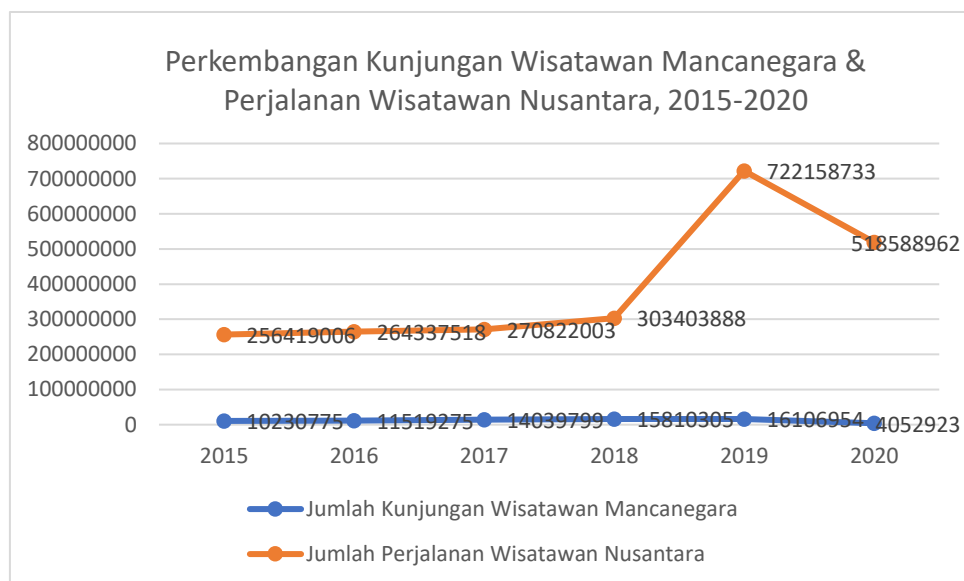


Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2020)

Gambar 1.1 Kontribusi Pariwisata Terhadap PDB Tahun 2017-2021 (Persen)

Dengan menjadi salah satu kekuatan pembangunan, potensi pariwisata di Indonesia sangat besar. Oleh karena itu, sektor pariwisata merupakan sektor yang mampu mendatangkan devisa. Devisa sektor pariwisata berasal dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke tempat wisata di Indonesia. Pada gambar 1.2 terlihat pada statistik kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai kunjungan tertinggi pada tahun 2019, sebanyak 161,06 juta orang. Kemudian pada tahun 2020, mengalami penurunan yang drastis yaitu menjadi 4,05 juta orang, maka dari itu sektor pariwisata menjadi terhambat akibat dampak pandemi covid-19. Sehingga, para wisatawan mancanegara tidak dapat berkunjung ke tempat wisata terutama terhalang oleh penutupan bandara. Selain dari kunjungan wisatawan mancanegara,

sektor pariwisata juga memiliki pendapatan yang berasal dari wisatawan nusantara/domestik. Jumlah perjalanan wisatawan nusantara pada tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara, terutama puncaknya pada tahun 2019 mencapai kunjungan tertinggi sebanyak 722,15 juta orang karena wisatawan datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Perjalanan wisatawan nusantara pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat banyak menjadi 518,58 juta orang, sama halnya dengan kondisi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara yang disebabkan oleh pandemi covid-19 pada tahun 2020.



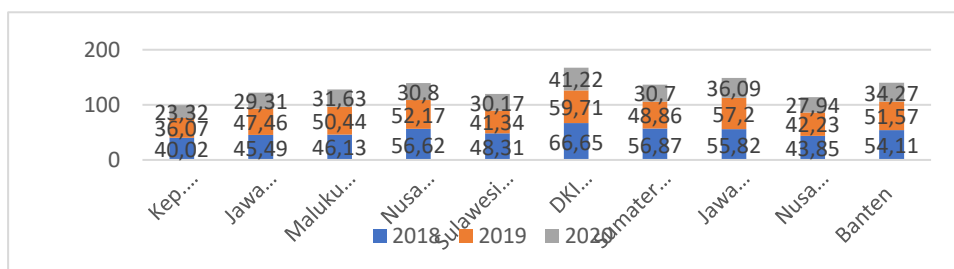
Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2020)

Gambar 1.2 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Perjalanan Wisatawan Nusantara di Indonesia Tahun 2015-2020 (Juta/Orang)

Wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik yang berkunjung ke daerah tujuan wisata, tentunya akan membutuhkan tempat menginap, seperti

penyewaan kamar hotel, dan akomodasi pariwisata lainnya. Semakin banyak wisatawan yang menginap maka semakin banyak pula kamar hotel yang dihuni oleh wisatawan, hal ini mempengaruhi pada tingkat hunian kamar hotel. Tingkat Penghunian Kamar Hotel (TPK) adalah jumlah kamar yang telah disewakan/dihuni dibandingkan dengan jumlah kamar yang tersedia di hotel tersebut. (Badan Pusat Statistik, 2020)

Tingkat Penghunian Kamar Hotel (TPK) memiliki indikator antara lain jumlah kamar yang terjual, rata-rata lama tamu menginap dan jumlah hotel bintang atau non bintang. Rata-rata lama tamu menginap salah satu komponen penting untuk mengetahui seberapa tertarik wisatawan pada daerah tujuan wisata yang dikunjungi. Semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah, membuktikan bahwa daerah tempat wisata tersebut diminati oleh wisatawan. Berikut gambar 1.3 perkembangan Tingkat Hunian Kamar Hotel (TPK) bintang di 10 provinsi KSPN tahun 2018-2020.



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2020)

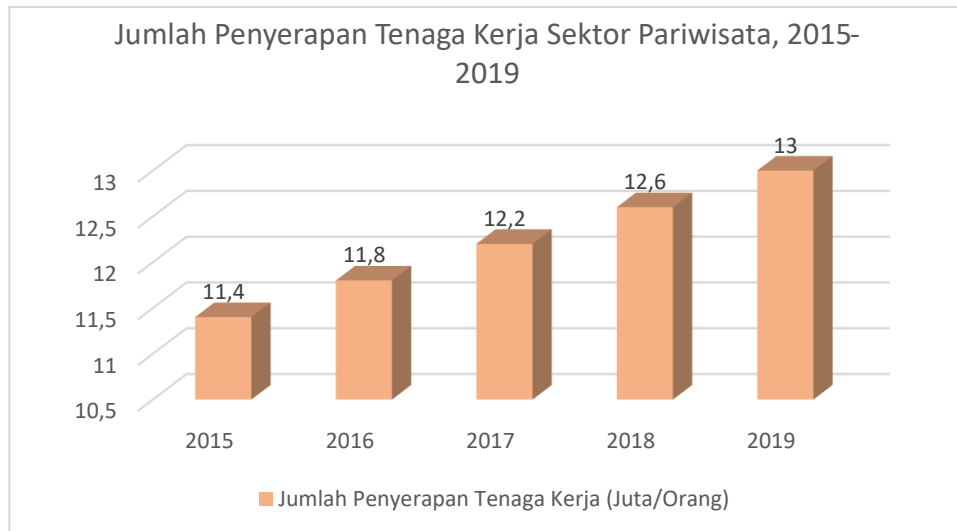
Gambar 1.3 Perkembangan Tingkat Hunian Kamar Hotel Bintang di 10 Provinsi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tahun 2018-2020 (Persen)

Terlihat pada gambar 1.3 menunjukkan data perkembangan tingkat hunian kamar hotel di 10 provinsi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Dapat

diketahui, tingkat hunian kamar hotel di 10 provinsi KSPN mengalami fluktuatif dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Ada beberapa provinsi yang mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2019, antara lain Jawa Tengah dengan peningkatan tingkat hunian kamar hotel dari 45,49% menjadi 47,46% hal ini mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 1,97%. Selain itu, Maluku Utara mengalami hal yang sama yaitu adanya peningkatan tingkat hunian kamar hotel dari 46,13% menjadi 50,44% mengalami kenaikan pertumbuhan lebih besar yaitu 4,31%. Kemudian di Jawa Timur mengalami peningkatan tingkat hunian kamar hotel dari 55,82% menjadi 57,2% mengalami sedikit ada kenaikan pertumbuhan sebesar 1,38%. Bila dilihat dari urutan tiga provinsi yang mengalami peningkatan pada tingkat hunian kamar hotel, jika dibandingkan dengan tahun 2018 hingga tahun 2019. Pada tahun 2020 seluruh provinsi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional mengalami penurunan serentak, terutama provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengalami penurunan hingga 23,32% paling rendah diantara 10 provinsi KSPN, hal ini diakibatkan karena adanya pandemi covid-19. Maka dari itu, terjadi penurunan pada tingkat hunian kamar hotel di akibatkan pula oleh pembatasan kamar hotel.

Melihat pada data perkembangan tingkat hunian kamar hotel, sebagaimana hotel merupakan usaha yang menunjang wisatawan dalam berwisata. Seiring dengan banyaknya perkembangan hotel di 10 Provinsi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) semakin berkembang, maka hotel sangat membuka lapangan kerja baru yang menimbulkan permintaan pada tenaga kerja. Penduduk

yang bekerja akan terserap dan tersebar pada sektor perekonomian terutama pada sektor pariwisata.



Sumber: (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2019)

Gambar 1.4 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pariwisata di Indonesia (Juta/Orang) Tahun 2015-2019

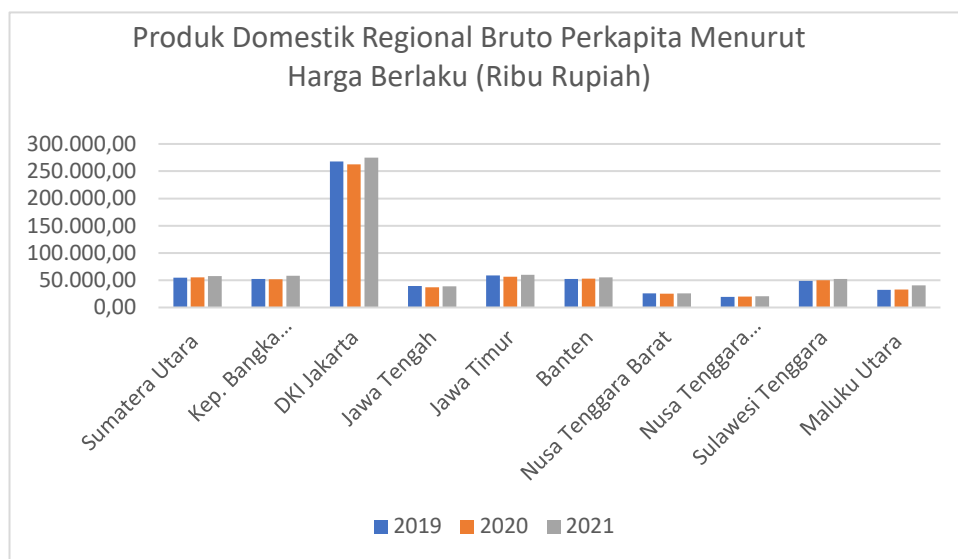
Pada gambar 1.4 terlihat bahwa penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2015, tenaga kerja sektor pariwisata terdapat 11,4 juta orang kemudian hingga tahun 2019 terus meningkat jumlah tenaga kerja sektor pariwisata sebanyak 13 juta orang, hal ini membuktikan banyaknya orang yang bekerja sehingga orang yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai usaha seperti hotel, *restaurant* dan usaha akomodasi pariwisata lainnya. Menunjukkan bahwa dalam pariwisata, hotel ataupun akomodasi pariwisata lain merupakan sektor yang memiliki potensi pariwisata yang besar dalam meningkatkan tenaga kerja. Maka dari itu, banyaknya tenaga kerja yang terserap akan mendorong sektor pariwisata menjadi semakin berkembang pesat.

Dengan berkembangnya jumlah serapan tenaga kerja pada sektor pariwisata, hal ini dapat menyebabkan pada tingkat kesejahteraan masyarakat di provinsi-provinsi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Pada dasarnya pemerintah akan memperluas kesempatan kerja dan menciptakan kesejahteraan masyarakat yang dapat meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang baik, guna mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang layak pada berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, kondisi ekonomi masyarakat, kebahagiaan yang dirasakan menuju kehidupan yang lebih baik untuk masa mendatang.

Sangat erat kaitannya kesejahteraan masyarakat dengan pendapatan yang diperoleh dari rumah tangga, sehingga penduduk yang bekerja pada sektor pariwisata akan menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan kebutuhan lainnya. Oleh sebab itu, tenaga kerja menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah secara keseluruhan dan dapat menggambarkan kondisi perekonomian dan sosial terutama dalam tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah provinsi-provinsi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dalam kurun waktu tertentu untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang berkualitas.

Ada beberapa indikator yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di 10 provinsi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Salah satu indikator untuk melihat sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar kelapisan masyarakat dan menikmati hasilnya dilihat dari PDRB. Semakin tinggi PDRB yang diperoleh, maka akan bertambahnya kualitas produktifitas yang dihasilkan masyarakat dalam

memanfaatkan sumberdaya yang ada di daerahnya secara maksimal yang diperoleh dari berbagai kegiatan ekonomi pada suatu wilayah dengan periode tertentu. Dapat dilihat gambar 1.5 kesejahteraan masyarakat diukur oleh Produk Domestik Regional Bruto Perkapita menurut Harga Berlaku di 10 Provinsi KSPN sebagai berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Menurut Harga Berlaku di 10 Provinsi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Tahun 2019-2021 (Ribu Rupiah)

Pada gambar 1.5 menunjukkan data PDRB perkapita tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 di 10 Provinsi KSPN, tercatat bahwa PDRB tertinggi berada pada provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami penurunan dari Rp. 268.052,25 menjadi Rp. 262.702,12 kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan akibat pemulihan ekonomi dari pandemi covid-19 menjadi Rp. 274.709,59. Pada hal ini, menunjukkan bahwa kesejahteraan penduduk mulai terlihat baik pada tahun 2021 sejak terbukanya lapangan kerja, dan sebagai proses

perubahan kondisi perekonomian yang lebih baik selama periode tertentu serta kegiatan ekonomi kembali bangkit salahsatunya pada sektor pariwisata.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam *welfare economics*, kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari ketenagakerjaan yang artinya penghasilan yang diperoleh berkaitan dengan usaha atau pekerjaan yang dilakukan oleh anggota rumah tangga. Selain itu, semakin banyak tenaga kerja akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, kajian tentang penyerapan tenaga kerja pada sektor pariwisata dan kesejahteraan masyarakat di provinsi-provinsi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) secara lebih mendalam dirasakan hal yang menarik untuk di teliti. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata dan kesejahteraan masyarakat di provinsi-provinsi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) seperti kunjungan wisatawan mancanegara, perjalanan wisatawan nusantara, tingkat hunian kamar hotel, dan upah minimum. Dalam penelitian ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PARIWISATA SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI-PROVINSI KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (KSPN) TAHUN 2009-2018”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang telah dipaparkan oleh penulis.

Adapun kajian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara, Tingkat Hunian Kamar Hotel, Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara, Upah Minimum, Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata, dan Kesejahteraan Masyarakat selama pandemi covid-19 di 10 Provinsi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)?
2. Bagaimana pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara, Tingkat Hunian Kamar Hotel, Perjalanan Wisatawan Nusantara, dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata di 10 Provinsi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) tahun 2009-2018?
3. Bagaimana pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata terhadap Kesejahteraan Masyarakat di 10 Provinsi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) tahun 2009-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, yang telah di paparkan oleh penulis.

Adapun tujuan penelitian untuk memberikan jawaban pada permasalahan di atas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbandingan kondisi Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara, Tingkat Hunian Kamar Hotel, Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara, Upah Minimum, Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata,

dan Kesejahteraan Masyarakat selama covid-19 di 10 Provinsi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

2. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Wisatawan Mancanegara, Tingkat Hunian Kamar Hotel, Perjalanan Wisatawan Nusantara, dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata di 10 Provinsi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tahun 2009-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata terhadap Kesejahteraan Masyarakat di 10 Provinsi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tahun 2009-2018.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat berguna dan memberikan kontribusi. Adapun kegunaan penelitian ini terbagi menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis pada penelitian ini yaitu, dapat memberikan referensi pengembangan ilmu pengetahuan secara akademis berupa sumber informasi pada kajian ilmu ekonomi yang khususnya terkait dengan pengaruh jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, tingkat hunian kamar hotel, perjalanan wisatawan nusantara, dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di 10 provinsi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Lembaga Pendidikan

Dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan informasi yang berguna terkait ilmu ekonomi sektor pariwisata dalam mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, tingkat hunian kamar hotel, perjalanan wisatawan nusantara, dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di 10 provinsi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

2. Bagi Masyarakat Umum

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat berkontribusi dengan adanya program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

3. Bagi Mahasiswa/Mahasiswi

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan penelitian ini sebagai referensi terbaru untuk mahasiswa/mahasiswi yang tertarik ingin meneliti lebih lanjut tentang kajian Pengaruh Jumlah Wisatawan Mancanegara, Tingkat Hunian Kamar Hotel, Perjalanan Wisatawan Nusantara, dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata Serta Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di 10 Povinsi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

4. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi tantangan bagi penulis untuk mengetahui ilmu pengetahuan baru serta memberikan pemahaman yang berguna untuk dunia baru di masa yang akan datang.